

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN
DESA PATIHAN KIDUL
Jl. Tanjung No 41 Kode Pos 63471
PATIHAN KIDUL



PERATURAN DESA

DESA : PATIHAN KIDUL
KECAMATAN : SIMAN
KABUPATEN : PONOROGO
NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PATIHAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022



SALINAN

KEPALA DESA PATIHAN KIDUL KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA PATIHAN KIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATIHAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATIHAN KIDUL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor

21);

22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018

Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 92);

20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);
30. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 64);
31. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 71);
32. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 86);
33. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022;
34. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 90);
35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Ponorogo Nomor 78 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 98);

36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 102 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 102);
37. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 107 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 107);
38. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 108);
39. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 109);
40. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Desa Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 115);
41. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun

2019 Nomor 7);

43. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 2019 Nomor 9);
44. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 05 Nomor 2019);
45. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman tahun 2022 (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 2020 Nomor 4);
46. Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Tahun 2021(Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 2020 Nomor 11).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Patihan Kidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Tahun 2021 (Lembaran Desa Patihan Kidul Tahun 2021 Nomor 6).

- Memperhatikan
- 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa.
 - 3 Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 - 4 Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 10/PRI.00/IV/

2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- 5 Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- 6 Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.
- 7 Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ponorogo;
- 8 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 144.2/2811/112.2/2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATIHAN KIDUL

Dan

KEPALA DESA PATIHAN KIDUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patihan Kidul Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.514.680.764,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.640.818.960,23
Surpuls/Defisit	Rp.	(126.138.196,23)
3. Pembiayaan		

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	136.138.196,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	126.138.196,23
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Patihan Kidul.

Ditetapkan di Patihan Kidul
Pada tanggal 17 Desember 2021
KEPALA DESA PATIHAN KIDUL,

ttd

MOH. KUSTUR


Diundangkan di Patihan Kidul
Pada tanggal 31 Desember 2021
Sekretaris Desa Patihan Kidul

ttd

NUR WAHYUDDIN

Lembaran Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Tahun 2021 Nomor 9

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Desa Patihan Kidul



NUR WAHYUDDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PATIHAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.309.680.764,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.514.680.764,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	610.197.220,57	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	501.725.200,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.995.800,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	41.995.800,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	230.843.250,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	230.843.250,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.816.700,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	2.816.700,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.709.450,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.709.450,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.142.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.142.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.818.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.818.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	67.800.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	67.800.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD	4.200.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.917.020,57	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.917.020,57	PBH
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	3.917.020,57	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.850.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.880.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	3.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	5.070.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.950.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LP PDesa dan Informasi Kepada Masya)	4.700.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.460.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	
1.4.91		Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	35.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	31.025.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agen da Pertanahan)	5.000.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	7.200.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	4.800.000,00	
1.5.90		Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	8.825.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.825.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>239.876.350,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.1.90		Bantuan Intensif Guru taman Belajar Keagamaan	5.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.743.050,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	88.643.050,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.643.050,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.91		Pengembangan Apotik Hidup Desa dan Produk Holtikultura	0,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.133.300,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	68.133.300,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	68.133.300,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12.900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
2.6.92		Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital	4.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.100.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	7.100.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	7.100.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>238.980.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	56.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	56.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	162.980.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	6.980.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.000.000,00	ADD, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/ RW	135.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00	PBK
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.965.389,66</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	28.300.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8.400.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	19.900.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	120.650.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	25.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	22.900.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.250.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	27.250.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian Dan Peternakan	32.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.570.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.3.90		Sosialisasi Dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa	2.070.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
4.3.91		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	0,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.550.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.550.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.92		Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	18.550.000,00	DDS
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.92	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	DDS
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	DDS, PAD
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	35.845.389,66	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	35.845.389,66	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.745.389,66	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>298.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.640.818.960,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(126.138.196,23)	
		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	136.138.196,23	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	126.138.196,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Patihan Kidul, 17 Desember 2021
KEPALA DESA

ttd

MOH. KUSTUR

